

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LatarBelakang**

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas LKPD setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan, dimana opini BPK diberikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada empat kriteria yaitu: (1) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), (2) ketaatan terhadap perundang undangan, (3) kecukupan pengungkapan, dan (4) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan

Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Mahardini dan Ade (2018)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggungjawaban pemerintah atas penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang undang nomor 1 tahun 2004, maka pemerintah menyempurnakan Peraturan Pemerintah

Fenomena yang terjadi di OPD Kabupaten Pati, berdasarkan <https://www.murianews.com> (29 November 2018) Kepala Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Arief Setyo Handono digelandang ke Mapolres Pati lantaran melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah bukti dan saksi. Indikasi penyalahgunaan adalah pemalsuan laporan pertanggung jawaban dan tanda tangan, adanya bukti kwitansi dalam laporan keuangan tetapi tidak adanya proses penyaluran kegiatan, korupsi dana desa senilai Rp 199.000.000 guna pembangunan talut dan balai desa serba guna, dan kegiatan fiktif atas nama pemuda karang taruna. Lebih lanjut, pihak kepolisian juga sudah mengirimkan berkas Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya diproses oleh pengadilan.

Faktor kedua dari <http://jateng.tribunnews.com> (3 Agustus 2017) Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, menerima laporan dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana lainnya di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Dana

yang diselewengkan merupakan alokasi anggaran untuk beberapa proyek fiktif yang tidak sesuai dengan laporan keuangan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Di samping itu, Kepala Desa di Regaloh diduga memonopoli kewenangan dalam mekanisme pencairan dan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa lainnya.

Pada penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mahardini dan Ade (2018). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel independen, yaitu standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu sistem pengendalian intern, karena sistem pengendalian intern memberikan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang undangan Widari dan Sutrisno (2017) dan komitmen karena adanya keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan

berkontribusi terhadap organisasinya, dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterikatan anggota dengan organisasinya (Widari dan Sutrisno (2017)). Alasan penambahan kedua variabel tersebut karena pada penelitian yang dilakukan oleh Mahardini dan Ade Miranti (2018) telah disarankan agar menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, salah satu faktornya adalah sistem pengendalian intern dan komitmen. Dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya penambahan sistem pengendalian intern yang terdapat pada penelitian Widari dan Sutrisno (2017) dan komitmen yang terdapat pada penelitian Darmawan, (2013:168) dalam Widari dan Sutrisno (2017), saya ingin mengembangkannya pada penelitian ini supaya penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah ini lebih berkembang lagi dalam memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda dan hasilnya dapat lebih maksimal dan akurat lagi.

Perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mahardini dan Ade Miranti (2018) adalah, berkaitan dengan objek penelitian yang sebelumnya di Banten, sedangkan penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang ada di Jawa Tengah.

Perbedaan penelitian yang ketiga dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan yaitu periode tahun 2016-2018, menggunakan tahun terbaru agar hasil penelitian mampu mencerminkan kondisi yang terjadi pada saat ini. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh



Mahardini dan Ade Miranti (2018) menggunakan periode tahun anggaran 2015.

Penelitian ini akan dilakukan pada organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Pati. Alasan pemilihan pada organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Pati dikarenakan memiliki 52 OPD yang sangat berpengaruh dalam laporan keuangan pemerintahan dan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar terjamin di setiap programnya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Kabupaten Pati”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah untuk dipahami serta untuk menghindari adanya salah tafsir terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini dikantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.
2. Responden penelitian ini adalah Kepala SKPD atau OPD dan Kepala Bagian Keuangan yang bekerja di SKPD atau OPD Kabupaten Pati

3. Fokus penelitian ini untuk menguji secara empiris dampak penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, komitmen dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah OPD Kabupaten Pati

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah komitmen berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif penerapan standar akuntansi pada kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen pada kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi penulis dan para akademisi yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis/Empiris

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan dasar pengalaman dan wawasan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan yang ada dilapangan, serta dapat membantu penulis untuk dapat memahami lebih dalam mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, komitmen dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati, hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi praktik berupa saran agar lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, komitmen dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

